EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

Pemberdayaan E-Warong Kube Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Kota Sibolga

Muhammad Heru Akhmadi[1], Erin Widya Butar Butar[2] dan Erlita Nurma Wati[3*]
[1,2]Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
[3*]Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Indonesia
*e-mail : erlitanurmaw@gmail.com

Artikel Info

Received :
26 April 2022
Revised :
13 January 2023
Accepted :
23 January 2023

Kata Kunci :
program sembako, bantuan sosial pangan, pemberdayaan, e-warong KUBE

Keywords :
basic food programs, food social assistance, empowerment, e-warong KUBE

ABSTRAK

Program bantuan sosial sembako adalah salah satu jenis program bantuan sosial yang membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan, memberikan gizi yang seimbang, dan sebagai salah satu upaya mencegah *stunting*. Mekanisme penyaluran program ini melibatkan Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) sebagai tempat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbelanja bahan pangan. Jumlah e-Warong di Kota Sibolga sebanyak 19 e-Warong dimana lima diantaranya merupakan e-Warong KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemberdayaan e-Warong KUBE dalam program bantuan sosial sembako di Kota Sibolga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Pengolahan data menggunakan aplikasi Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan e-Warong KUBE berdampak pada peningkatan dan kepastian perolehan pendapatan, bertambahnya kegiatan usaha dari pemanfaatan mesin EDC, peningkatan jiwa wirausaha pengelola e-Warong KUBE. Terdapat kendala yang di hadapi e-Warong KUBE antara lain rendahnya tingkat partisipasi anggota-anggota KUBE, rendahnya kemampuan manajemen usaha, dan tingginya persaingan antar e-Warong, Pada sisi lain terdapat kendala pada regulator program, yaitu Dinas Sosial Kota Sibolga antara lain kurangnya koordinasi dengan bank penyalur dan kesulitan dalam menghadapi keinginan KPM terhadap kesesuaian bahan pokok dengan pedoman umum program bantuan sosial.

Empowerment Of E-Warong Kube During The Covid-19 Pandemic Case Study: Sibolga City

ABSTRACT

Basic food programs is one type of social assistance program that helps underprivileged communities in fulfill basic food needs, providing balanced nutrition, and as an effort to prevent stunting. The distribution mechanism of this program involves the Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) as a palce of Keluarga Penerima Manfaat (KPM) to shop for food. There are 19 e-Warongs in Sibolga City, five of which are

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

e-Warongs KUBE. This study aims to understand the empowerment of e-Warong KUBE in the basic food social assistance program in Sibolga City in 2020. This study uses a qualitative method with data collection through library research, interviews, and observations. Data processing using the Atlas.ti application. The results show that the empowerment of e-Warong KUBE has an impact on increasing and ensuring income generation, increasing business activities from the use of EDC machines, increasing the entrepreneurial spirit of e-Warong KUBE managers. There are obstacles faced by e-Warong KUBE, including the low level of participation of KUBE members, low business management skills, and high competition between e-Warongs. On the other hand, there are obstacles in the program regulator at the Sibolga City Social Service, including lack of coordination with channeling banks and difficulties in dealing with KPM's desire for conformity of basic materials with general guidelines for social assistance programs.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan dan ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya khususnya kepemilikan aset (Jacobus *et al*., 2021). Tingkat kesejahteraan menunjukkan kemampuan dalam mengakses sumber daya yang biasanya diukur melalui jumlah pendapatan atau pengeluaran seseorang. Pemerintah berkewajiban untuk memajukan "kesejahteraan umum" sebagaimana yang tertuang dalam tujuan negara. Instrumen belanja pemerintah memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan (Taruno, 2019; Miar & Yunani, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan beberapa upaya dalam mencapai kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Belanja Bantuan Sosial merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka perlindungan sosial. Salah satu program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program bantuan sosial sembako. Program ini diselenggarakan secara non tunai sebagai bagian dari perbaikan penyempurnaan mekanisme pembayaran melalui peningkatan pemahaman keuangan (literasi) penerima bantuan (Akhmadi, 2017).

Program Sembako adalah salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dalam rangka pemenuhan hak akses terhadap salah satu kebutuhan dasar masyarakat yakni pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Program Sembako juga menjadi salah satu langkah pemerintah, untuk memberikan gizi yang seimbang dan penanganan *stunting* di Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak akses terhadap pangan adalah hak asasi yang layak dipenuhi. Program Bantuan Sosial Pangan pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang seimbang. Bantuan sosial pangan merupakan implementasi dari perlindungan sosial, dan/atau merupakan hak asasi manusia (Sabarisman & Suradi, 2020). Menurut Edi Suharto (2006, dikutip dalam Hilmi, 2021) bantuan sosial merupakan bagian dari jaminan sosial (*social security*). Sebagai bagian dari jaminan sosial, bantuan sosial dirancang agar setiap masyarakat bisa memiliki kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan parameter untuk melihat peran dan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

kepedulian negara dalam menjamin masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem jaring pengaman pendapatan (*financial safety net*) dari sumber pendapatan mereka (Suharto, 2005).

Dalam konsep pemerintahan Indonesia, bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa termasuk melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang ada dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan instrumen belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Pengalokasian dana yang bertujuan untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana ini kemudian dituangkan dalam jenis belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial diwujudkan dalam berbagai program. Salah satu jenis program yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah bantuan sosial pangan.

Bantuan sosial pangan juga menjadi wujud kepedulian pemerintah akan kebutuhan asupan nutrisi masyarakat dan sebagai upaya mencegah terjadinya kelaparan. Kekurangan nutrisi akan membawa dampak yang luas, antara lain pertumbuhan fisik, stunting dan kapasitas kecerdasan, atau kualitas sumber daya manusia (Sabarisman & Suradi, 2020). Jika kebutuhan pangan telah terpenuhi maka akan mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah dalam pengeluaran pangan, sehingga pengeluaran tersebut bisa dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar yang lain.

Pelaksanaan bantuan sosial pangan dilakukan secara non tunai melalui mekanisme pemberdayaan. Dalam bidang ekonomi dan bidang sosial pemberdayaan dilakukan dengan maksud agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pasar yang relatif stabil, dan menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya (Kurniawan & Fauziah, 2014). Pemberdayaan oleh pemerintah merupakan bentuk dukungan pengembangan potensi yang ada di dalam masyarakat. Pengembangan potensi akan mengarahkan pada peningkatan kemajuan usaha lokal, penciptaan lapangan pekerjaan, dan terciptanya inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut menumbuhkan ketahanan ekonomi (Rukminto, 2008, dikutip dalam Kurniawan & Fauziah, 2014).

Kebijakan Program Sembako memiliki perbedaan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Pertama*, indeks bantuan pada BPNT sebesar Rp110.000/KPM/bulan sedangkan Program Sembako sebesar Rp150.000/KPM/bulan yang kemudian pada Maret 2020 naik Rp50.000 sehingga menjadi Rp200.000/KPM/bulan sebagai bentuk stimulus untuk mengurangi dampak Covid-19. *Kedua*, jenis bahan pangan pada Program Sembako lebih bervariasi dan memiliki lebih banyak kandungan gizi dibandingkan dengan bahan pangan yang diberikan pada BPNT. Pada Program Sembako, bahan pangan yang diberikan harus terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, sagu; sumber protein hewani seperti telur, daging, ikan; sumber protein nabati seperti, tempe atau tahu; dan sumber vitamin dan mineral seperti, sayur-mayur dan buah-buahan. Sedangkan, bahan pangan yang diberikan pada program BPNT hanya berupa telur dan beras.

Sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial dalam penanganan Covid-19, pemerintah memberikan tambahan terhadap beberapa komponen tertentu dari Program Sembako. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh kebutuhan pangan yang bergizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

tangga. Berikut beberapa komponen yang berubah dari Program Sembako sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 (Kementerian Sosial, 2020).

Tabel 1. Perubahan Program Sembako sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

No	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
1	Sasaran	15,6 juta keluarga	20 juta keluarga	Tambahan 4,8 juta keluarga
2	Nilai Manfaat	Rp150.000/bulan	Rp200.000/bulan	Tambahan Rp50.000/bulan
3	Alokasi Anggaran	Rp22,4 triliun	Rp43,6 triliun	Rp15,5 triliun

Sumber : diolah dari Bahan Ratas Kementerian Sosial 13 April 2020

Program Sembako memiliki beberapa manfaat, yakni:

1. sebagai bentuk penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam hal ketahanan pangan;
2. meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah;
3. meningkatkan transaksi nontunai dan akses layanan keuangan dan perbankan kepada masyarakat;
4. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
5. mencegah terjadinya stunting; dan
6. sebagai salah satu instrumen Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Program Sembako dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 yakni :

1. Persiapan
   Kementerian Sosial selaku Pengguna Anggaran (PA) Program Sembako melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan dasar hukum, penentuan arah kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta ketentuan administrasi lainnya. Selain itu, koordinasi tingkat pemerintah pusat juga dilakukan dengan bank penyalur. Koordinasi dengan bank penyalur dilakukan antara lain untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung pelaksanaan Program Sembako dan waktu penyaluran atau pemindahbukuan dana dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening KPM.
2. Edukasi dan Sosialisasi
   Edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* di pusat dan daerah mengenai berbagai kebijakan pelaksanaan Program Sembako dan peran program ini sebagai bagian dari JPS dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan tujuan dana bantuan program Sembako kepada KPM, termasuk sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pengaduan.
3. Registrasi dan Distribusi KKS
   Tahapan ini dilakukan untuk KPM yang baru saja ditetapkan sebagai penerima bantuan. Sedangkan, bagi KPM yang telah memiliki KKS, dalam program BPNT dan/atau PKH, masih bisa memanfaatkan kartu tersebut untuk program Sembako.
4. Penyaluran Dana Bantuan
   Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana bantuan Program Sembako dari bank penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

Pemindahbukuan paling lama dilakukan 30 hari sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di bank penyalur.

5. Pemanfaatan Dana Bantuan
   Saldo yang telah terisi dalam KKS selanjutnya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan oleh KPM di e-Warong. KPM diberikan kebebasan untuk menentukan e-Warong untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako. KPM dapat memilih e-Warong yang memberikan pelayanan yang baik, bahan pangan berkualitas, harga bahan pangan yang sesuai, serta berhak menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparat kelurahan.
6. Pengendalian dan Pengawasan
   Pengendalian Program Sembako oleh Tim Pengendali dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas Program Sembako. Pengawasan pelaksanaan program dilakukan atas dua hal yakni, pengawasan pelaksanaan dan pengawasan perbankan. Pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program Sembako menggunakan kartu elektronik yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sejak pandemi Covid-19, besaran nilai yang diberikan meningkat dari semula Rp110.000/KPM/bulan, naik menjadi sebesar Rp150.000/KPM/bulan pada Januari-Februari 2020, dan kembali naik menjadi Rp200.000/KPM/bulan sejak Maret 2020. Kenaikan ini menunjukkan instrumen bantuan sosial sembako menjadi alat kebijakan pemerintah sebagai jangkar kemiskinan masyarakat (Riyanta *et al.*, 2020). Pada sisi lain jumlah KPM juga meningkat dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.

Penyaluran bahan pangan pada program bantuan sosial sembako dilaksanakan melalui transaksi pembelian pada Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong). E-Warong merupakan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang bertindak sebagai agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank penyalur sebagai tempat pembelian bahan pangan KPM. Kerja sama pemerintah dengan e-Warong merupakan salah satu unsur pemberdayaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melibatkan pelaku UMKM untuk mencapai tujuannya dengan proses yang efektif dan efisien (Kurniawan & Fauziah, 2014). UMKM memiliki peran strategis dan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia yang memberikan dampak pada terciptanya lapangan kerja, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal, inovasi yang dapat menciptakan pasar baru, serta mampu menekan deficit neraca pembayaran melalui ekspor (Setyawati, 2009).

Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warong KUBE) dikelola oleh masyarakat-masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai pemantik agar masyarakat tersebut bisa lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016, menjelaskan bahwa E-Warong KUBE adalah bentuk usaha yang didirikan dan dikelola secara kelompok dalam rangka memberikan pelayanan pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan sembako dan/atau sebagai sarana untuk memasarkan hasil produksi anggota KUBE dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan sosial.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2017. Pada saat awal pembentukan, e-Warong KUBE diberikan modal usaha sebesar Rp30.000.000 yang digunakan untuk modal usaha dan modal kerja, pembelian bahan pangan pokok, rehabilitasi ruangan, dan pembelian peralatan pendukung usaha e-Warong KUBE. Program e-Warong KUBE hadir untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu agar dapat meningkatkan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

ksejeahteraannya serta meringankan beban pengeluaran kebutuhannya. Selain itu, dengan adanya e-Warong KUBE diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat secara nontunai (*cashless*).

Masyarakat berasal dari satu kelurahan atau kecamatan yang sama dapat bergabung sebagai anggota pada satu e-Warong KUBE. Pembentukan e-Warong KUBE diawali oleh pengajuan permohonan dari kelompok masyarakat ke dinas sosial kabupaten/kota untuk selanjutnya di rekapitulasi dan disampaikan kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. Selanjutnya, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin memverifikasi permohonan dan menetapkan lokasi penerima bantuan. Hasil penetapan akan disampaikan oleh Dinas sosial Kabupaten/Kota kepada e-Warong KUBE. Di kota Sibolga tTerdapat 5 e-Warong KUBE, yakni e-Warong KUBE Jasa Anggrek, e-Warong KUBE Jasa Cempaka, e-Warong KUBE Jasa Gabu, e-Warong Jasa Kamboja, dan e-Warong Jasa Matahari.

Keberadaan e-Warong, selain berfungsi sebagai penyedia bahan pangan UKM juga berfungsi sebagai pelaku kewirausahaan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mendukung pengembangan usaha e-Warong melalui pengembangan kemampuan berusaha dan kemampuan dasar manajerial, serta peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Pemberdayaan e-Warong diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperoleh pelanggan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan usaha e-Warong. Sistem nontunai (*cashless*) yang dilaksanakan oleh e-Warong juga mampu mendorong terbukanya akses bagi masyarakat dalam menikmati jasa perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberdayaan e-Warong yang telah dilakukan dapat memberikan dampak kepada pemberdayaan dan peningkatan usaha e-Warong. Penelitian ini memfokuskan kepada pemberdayaan e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) degan mempertimbangkan bahwa usaha ini merupakan usaha bersama yang anggotanya merupakan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sehingga pemberdayaan e-Warong KUBE dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat khususnya penerima PKH yang memiliki kemampuan *entrepreneur*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang tau perilaku yang diamati (Daniel, 2012). Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Kota Sibolga pada tahun 2020.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah berbagai macam sumber macam sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data kedua adalah dengan wawancara kepada pejabat yang menangani bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Sibolga, Koordinator Bantuan Pangan Nontunai Kota Sibolga, dan ketua dari masing-masing e-Warong KUBE di Kota Sibolga. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Atlas.ti, dimana pengorganisasi koding dan pendeskripsian data dilakukan sesuai sesuai kategorinya, dan pengecekan koding yang telah dianalisis (Jupri, 2015, dikutip dalam Afriansyah, 2016). Hasil dari pengolahan data pada Atlas.ti berupa *coding* data transkrip, *wordcloud*, dan *network*.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sembako di Kota Sibolga Tahun 2020

Pada tahun 2020, sebanyak 456 keluarga di Kota Sibolga tergolong ke dalam kelompok keluarga prasejahtera dan sebanyak 18.919 keluarga merupakan keluarga sejahtera. Berdasarkan data dari BPS Kota Sibolga (2020), tahun 2020 masih terdapat 10,49 ribu orang atau 11,95 persen penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan nilai garis kemiskinan pada tahun 2020 sebesar Rp453.786. Tingkat kemiskinan ini mengindikasikan bahwa Kota Sibolga juga mengalami masalah sosial yang kompleks atas kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu implementasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memberdayakan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan peningkatan manfaat bantuan sosial pangan melalui Program Sembako.

Upaya tersebut terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Sibolga. Berdasarkan data dari BPS Kota Sibolga (2020), angka kemiskinan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 10,82 ribu atau 12,36 persen dari total penduduk Kota Sibolga. Pemerintah membentuk suatu basis data yang berisi informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Basis data yang dimaksud adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Sibolga, terdapat 6.560 kepala keluarga (KK) yang sudah terdata di dalam DTKS (per Oktober 2020). Dari 6.560 KK tersebut, terdapat rata-rata 4.840 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan pangan Program Sembako. Adapun rekapitulasi penyaluran bantuan pangan Program Sembako pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Sembako Kota Sibolga Tahun 2020

No	Alokasi KPM	Tersalur	Periode
1	4.820	2.482	Januari
2	4.820	3.390	Februari
3	4.820	2.848	Maret
4	4.820	2.636	April
5	4.509	4.033	Mei
6	5.164	4.010	Juni
7	5.164	4.661	Juli
8	5.164	4.670	Agustus
9	4.549	4.233	September
10	4.750	4.430	Oktober
11	4.750	4.457	November
12	4.750	4.603	Desember
Rata-rata	**4.840**	**3.871**	

Sumber : Dinas Sosial Kota Sibolga

Apabila dijabarkan, terdapat perubahan dari waktu ke waktu baik kenaikan maupun penurunan alokasi KPM Kota Sibolga. Hal ini dikarenakan perbaikan data yang senantiasa dilakukan setiap bulannya oleh Dinas Sosial Kota Sibolga. Yang dimaksud dengan perubahan data adalah penambahan jumlah KPM baru jika ada keluarga yang layak

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

menerima bantuan pangan dan juga pengurangan jumlah KPM yang biasanya diakibatkan oleh perbaikan dan penyesuaian data KPM pada Kartu Keluarga dengan data DTKS yang akan dipakai sebagai dasar penentuan kelayakan penerima.

Adapun data tersalur jumlahnya selalu lebih kecil dibandingkan alokasi jumlah KPM yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti KPM yang telah ditetapkan pindah, meninggal dunia, atau tidak ditemukan, termasuk jika KKS hilang atau rusak. Beberapa faktor tersebut membuat bahan pangan yang tersalur tidak mencapai target alokasi KPM.

Dampak Program Sembako dalam pemberdayaan E-Warong KUBE

Dengan dilibatkannya e-Warong sebagai agen bank dan tempat penyaluran bahan pangan Program Sembako, memberikan dampak dalam upaya yang juga turut memberdayakan e-Warong KUBE. Adapun dampak Program Sembako bagi e-Warong yang diidentifikasi melalui penelitian ini antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan E-Warong KUBE

Saat e-Warong KUBE dilibatkan menjadi penyalur bahan pangan Program Sembako hal ini tentunya menambah kegiatan usahanya. Selain itu, mesin EDC yang diberikan sejak pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Nontunai—yang merupakan bentuk lama dari Program Sembako—juga membuka peluang bagi e-Warong untuk memperoleh pelanggan (KPM dan non-KPM) dan meningkatkan penghasilan.

Besaran keuntungan ekonomi e-Warong KUBE sebagai penyalur bahan pangan Program Sembako diperoleh dari selisih harga bahan pangan yang dibeli dari pemasok dengan keseluruhan saldo KPM yang berbelanja, sebagaimana disampaikan Koordinator Daerah Bantuan Pangan Nontunai Kota Sibolga sebagai berikut:

> *"Pagu yang diberikan kepada tiap KPM adalah Rp200.000. Sebelumnya Program Sembako merupakan program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah tiap bulan. Besaran pagu yang diberikan kepada tiap KPM awalnya sebesar Rp110.000 pada tahun 2018 kemudian naik Rp150.000 hingga Februari 2020, namun semenjak terjadi Covid-19 di Indonesia yang membuat perekonomian dan daya beli masyarakat semakin melemah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial menambah pagu anggaran untuk melaksanakan program sembako sehingga tiap KPM mendapatkan saldo di KKS untuk Program Sembako sebesar Rp200.000. Dari saldo yang terdapat pada KPM ini, selisih antara harga sembako yang dibeli e-Warong KUBE ke pemasok dengan sisa keseluruhan saldo dari KKS yang masuk dari jumlah KPM yang mengambil akan menjadi keuntungan bagi e-Warong KUBE"*

Tabel 3. Pendapatan E-Warong KUBE Sebelum dan Sesudah Menjadi Penyalur Program Sembako

No	E-Warong KUBE	Sebelum*	Sesudah*	Selisih
1	E-Warong KUBE Jasa Cempaka	Rp300.000	Rp900.000	Rp600.000
2	E-Warong KUBE Jasa Anggrek	Rp400.000	Rp3.400.000	Rp3.000.000

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

3	E-Warong KUBE Jasa Kamboja	Rp3.000.000	Rp3.700.000	Rp700.000
4	E-Warong KUBE Jasa Gabu	Rp2.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000
5	E-Warong KUBE Jasa Matahari	Rp1.500.00	Rp2.500.000	Rp1.000.000

Sumber : Hasil wawancara dengan ketua e-Warong KUBE
Keterangan : * = besaran angka merupakan perkiraan rata-rata pendapatan per bulan

Dari tabel 3 dapat disimpulkan terjadi kenaikan pendapatan di setiap e-Warong KUBE dengan adanya tambahan kegiatan usaha dari kegiatan menyalurkan bahan Pangan Program Sembako dan pelayanan dari penggunaan mesin EDC. Namun, pendapatan yang diterima oleh masing-masing e-Warong KUBE akan berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Bantuan Pangan Nontunai Kota Sibolga berikut:

> *"...setiap e-Warong KUBE nantinya akan mendapatkan jumlah penghasilan yang berbeda-beda karena tergantung bagaimana pelayanan yang diberikan kepada KPM dan jumlah KPM yang berada di kecamatan tempat e-Warong tersebut. KPM menilai e-Warong tempat mereka akan berbelanja pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keramah-tamahan, cara melayani KPM, atau fasilitas yang diberikan kepada KPM saat hendak mendapatkan sembako seperti mengantar paket sembako ke alamat KPM langsung."*

Berdasarkan hasil wawancara, tambahan pendapatan digunakan untuk membayar beban operasional usaha (seperti membayar listrik), mengisi kembali produk-produk yang dijual, modal untuk menyediakan bahan pangan untuk disalurkan, dan sebagian ditahan di rekening e-Warong KUBE untuk modal saat memberikan pelayanan dengan mesin EDC. Selain itu, pendapatan akan dibagikan antar anggota untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing anggota.

2. Memiliki Kepastian Pendapatan

Dalam menjalankan usahanya sebagai toko kelontong, pendapatan e-Warong KUBE sifatnya tidak pasti karena hanya bergantung pada orang yang berbelanja atau membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sesuai dengan karakteristik UMKM pada umumnya, e-Warong KUBE memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal diversifikasi pasar. Berdasarkan hasil pengamatan, ada beberapa usaha kelontong sejenis yang lokasinya juga berdekatan e-Warong KUBE dan menjual produk-produk yang sama jenisnya. Hal ini mendorong terjadinya persaingan dan juga menjadi salah satu faktor pendorong ketidakpastian pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum ikut serta dalam pelaksanaan Program Sembako, pelanggan yang membeli tidak terlalu banyak dan pendapatan yang diterima tidak pasti atau tidak cukup untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, dengan diberdayakannya e-Warong KUBE sebagai penyalur bahan pangan maka akan memberikan kepastian pendapatan.

3. Pemanfaatan Mesin EDC

Fitur yang terdapat di mesin EDC yang bisa dimanfaatkan oleh e-Warong KUBE antara lain, transfer, setor pasti, isi ulang pulsa, tarik tunai, setor tunai, bayar listrik, bayar

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

telepon, bayar cicilan, bayar tagihan telepon, bayar BPJS, dan pembayaran tiket. Dengan adanya tambahan kegiatan usaha tentunya menambah pendapatan e-Warong KUBE. Selain itu, akan menambah pelanggan e-Warong KUBE. Sebelumnya, pelanggan yang datang hanya yang berkepentingan untuk membeli produk kebutuhan sehari-hari. Semenjak adanya layanan dengan pemanfaatan mesin EDC, terjadi penambahan pelanggan dari KPM yang akan mencairkan saldo KKS untuk membeli bahan pangan, maupun masyarakat non-KPM yang hendak melakukan transaksi perbankan.

4. Membantu Memenuhi Kebutuhan Pangan Keluarga

Anggota-anggota e-Warong KUBE juga merupakan penerima bantuan pangan Program Sembako karena pada dasarnya para anggota merupakan masyarakat dengan ekonomi lemah yang layak mendapatkan bantuan. Dengan adanya pemberian bantuan pangan Program Sembako dapat membantu para anggota e-Warong KUBE memenuhi sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang seimbang. Jika kebutuhan pangan telah terpenuhi maka akan mengurangi beban KPM dalam pengeluaran pangan dan pengeluaran tersebut bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

5. Mengembangkan Jiwa Berwirausaha

Kewirausahaan dalam hal pengelolaan e-Warong KUBE diwujudkan dalam tindakan pengembangan usaha dan kemampuan penanganan masalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan (KPM dan non-KPM) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan perannya dalam Program Sembako, e-Warong KUBE harus memberikan pelayanan terbaik kepada KPM sehingga mampu bersaing dengan e-Warong lain dan mempertahankan KPM yang berbelanja ke e-Warong KUBE tersebut. Memberikan pelayanan terbaik seperti misalnya keramah-tamahan, kemampuan berkomunikasi dalam hal memberikan informasi atau pemahaman kepada KPM mengenai kebijakan Program Sembako, kemampuan mencari solusi dan mengambil keputusan jika terjadi permasalahan, dan keefektifan waktu pelayanan sehingga KPM bisa nyaman dan tidak perlu mengantre saat berbelanja. Selain pelayanan kepada KPM, e-Warong KUBE juga dikembangkan jiwa berwirausahanya dalam hal menentukan pemasok dan jumlah bahan pangan.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Sembako di Kota Sibolga

Dalam pelaksanaan Program Sembako tersebut, terdapat beberapa kendala baik dari sisi e-Warong KUBE maupun Dinas Sosial antara lain :

1. Kendala bagi E-Warong KUBE
   a. Rendahnya Partisipasi Anggota

      Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan banyak anggota e-Warong KUBE yang tidak aktif dalam menjalankan usaha. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 mengatur bahwa e-Warong KUBE dapat dibentuk dengan sepuluh orang anggota, namun fakta yang ditemukan saat pendataan pada masing-masing e-Warong KUBE Sibolga, empat e-Warong KUBE tidak bisa memberikan informasi nama-nama kesepuluh orang anggotanya dikarenakan anggota-anggota tersebut memang telah lama tidak aktif.

      Keaktifan menjalankan usaha kebanyakan hanya ditunjukkan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara saja. Berdasarkan hasil wawancara, pada e-Warong KUBE Anggrek 8 dari 10 anggotanya aktif menjalankan usaha; e-Warong Kamboja dan e-Warong Cempaka hanya ketua, sekretaris dan bendahara yang aktif menjalankan usaha; sedangkan e-Warong Gabu dan e-Warong Matahari hanya ketuanya saja yang aktif menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan rendahnya kerja sama tim KUBE. Kerja sama yang kurang baik akan menurunkan efisiensi dan efektivitas e-Warong KUBE dalam

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

melayani KPM dan pelanggannya yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan usaha.

Di Kota Sibolga hanya e-Warong KUBE Jasa Anggrek yang keseluruhan anggotanya memiliki pekerjaan utama mengelola usaha e-Warong KUBE. Sementara itu, keempat e-Warong lainnya memiliki pekerjaan lain sehingga menjalankan usaha e-Warong KUBE belum menjadi fokus utama mereka. Hal ini membuat tujuan pemberdayaan tidak sepenuhnya tercapai.

Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya menyediakan sarana saja namun harus juga melatih keterampilan, memberikan wawasan dan semangat berwirausaha. Partisipasi yang rendah pada anggota-anggota e-Warong KUBE Sibolga menunjukkan bahwa mengelola usaha KUBE termasuk menjalankan penyaluran bahan pangan Program Sembako masih belum mampu sepenuhnya meningkatkan perekonomian para anggota sehingga mereka lebih berfokus ke pekerjaan lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa semangat berwirausaha masyarakat masih rendah.

b. Rendahnya Kemampuan Manajemen Usaha

Pada dasarnya setiap usaha memerlukan suatu pola manajemen. Manajemen usaha yang sederhana misalnya melakukan pembukuan, menyusun Aturan Rumah Tangga (ART) dan perencanaan kegiatan. Namun pelaksanaan manajemen sebagai bagian dari pengelolaan usaha pada e-Warong KUBE masih menjadi permasalahan. Hal ini dikarena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya akses kepada sumber daya produktif. Dalam praktiknya, manajemen dan inovasi pada e-Warong KUBE Sibolga belum terlalu dapat dilihat dan masih terdapat kendala sebagai berikut:

1) keanggotaan dan pembagian tugas belum berjalan dengan baik. Banyak anggota yang tidak aktif dan belum ada penetapan pembagian piket dan sistem kerja yang pasti oleh e-Warong KUBE. Sejauh ini hanya e-Warong KUBE Anggrek yang sudah menjalankan sistem piket bagi para anggotanya;
2) e-Warong belum secara komprehensif memahami informasi dan konsep Program Sembako;
3) pengelola e-Warong, pendamping, dan Dinas Sosial Kota Sibolga masih belum memahami proses bisnis dan *market analysis* secara komprehensif;
4) *market share* masih terbatas di lingkungan KPM, tetapi masih memiliki potensi untuk diperluas; dan
5) pengambilan keputusan dan solusi saat terjadi masalah masih lambat dikarenakan harus menunggu arahan atau perintah dari pemerintah.

c. Kurangnya Pelatihan bagi e-Warong KUBE

Pelaksanaan pelatihan dan bantuan manajerial merupakan salah satu unsur pemberdayaan sehingga e-Warong KUBE bisa berinovasi dan berkreasi dalam mengelola bantuan pangan yang akan dijual. Pada praktiknya, pelatihan yang diberikan kepada e-Warong KUBE masih sebatas cara penggunaan menu-menu pada mesin EDC dan sosialisasi kebijakan Bantuan Pangan Nontunai pada saat awal pelaksanaannya. Ketiadaan pelatihan yang lebih lanjut seperti pelatihan kewirausahan, pembukuan, dan bantuan manajerial lainnya menimbulkan permasalahan antara lain, minimnya kemampuan pengelola e-Warong dalam mengambil solusi saat terjadi kendala pada saat penyaluran, lambatnya pengembangan usaha, tingginya tingkat ketergantungan pada program pemerintah (seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan) dalam menjalankan usaha, dan pemahaman yang rendah mengenai proses pembukuan transaksi dan standar operasional prosedur penanganan masalah pada mesin EDC.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

d. Persaingan antar e-Warong KUBE

Jumlah e Warong di Kota Sibolga mencapai 19 (sembilan belas) e-Warong sebagai tempat penjualan bahan pangan kepada KPM. Keseluruhan e-Warong memiliki bentuk usaha yang sama, yakni toko kelontong. Bentuk usaha yang sama dan kebebasan oleh KPM mengakibatkan tingginya persaingan antar e-Warong. Berdasarkan hasil pengamatan, e-Warong selain e-Warong KUBE banyak yang usahanya lebih berkembang dan lebih maju, produk yang dijual lebih banyak dan bervariasi, pegawai lebih banyak, dan secara proses bisnis lebih baik dibandingkan dengan e-Warong KUBE. Upaya e-Warong KUBE untuk mengembangkan usaha agar tidak kalah saing juga masih sulit untuk diwujudkan karena masih terhambat modal dan kurangnya kemampuan manajerial usaha.

e. Kendala Mesin EDC dan Saldo KKS

Pada saat pelaksanaan penyaluran sering terjadi kendala hilangnya sinyal ataupun eror pada mesin EDC. Kendala ini mengakibatkan KPM harus menunggu mesin diperbaiki atau sinyal kembali baik. Seringkali proses perbaikan kendala ini memakan waktu dan yang tidak pasti. Hal ini akan menjadi masalah bagi KPM karena bahan pangan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga yang bersifat mendesak pemenuhannya. Pada saat transaksi gagal maka hal ini akan menambah beban KPM karena mereka harus mencoba memastikan lagi mesin pada hari lainnya dan tentunya akan menambah biaya ongkos. Selain itu, masih sering dijumpai permasalahan saldo pada kartu KPM yang nol atau terlambat dikarenakan validasi data dari pusat yang masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan sangat banyak KPM yang dalam bulan itu tidak mendapat bantuan Program Sembako. Saat banyak KPM tidak bisa mendapatkan sembako, maka sembako yang telah disiapkan oleh e-Warong KUBE menjadi bersisa. Akibatnya e-Warong KUBE akan mengalami kerugian karena sembako yang telah dibeli bersifat tidak tahan lama dan mudah membusuk. Pada saat sembako rusak atau busuk, tidak dapat dilakukan pengembalian kepada pemasok melainkan harus tetap dibayar sejumlah yang telah di-*supply*.

2. Kendala bagi Dinas Sosial Kota Sibolga

a. Kurangnya Koordinasi Data dengan Bank Penyalur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Harian Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sibolga, pelaksanaan koordinasi antara Dinas Sosial Kota Sibolga dengan BRI Kantor Cabang Sibolga masih belum optimal. Hal ini menjadi kendala karena beberapa laporan tertentu harusnya saling dikoordinasikan sehingga bisa melihat pengembangan program dan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan kedepannya.

b. Kesulitan dalam Menghadapi Keinginan KPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Daerah Bantuan Pangan Nontunai Kota Sibolga, banyak keluhan dari KPM mengenai jenis bahan pangan yang diberikan pada Program Sembako. Bahan pangan tersebut dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan KPM. Banyak KPM yang mengatakan tidak terlalu membutuhkan kacang hijau atau buah-buahan dan lebih menyatakan lebih membutuhkan minyak goreng atau gula. Keluhan ini menjadi kendala bagi Dinas Sosial karena harus senantiasa menjelaskan mengenai intensi dan esensi Program Sembako ini, yaitu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini KPM, bukan apa yang diinginkan.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal mengenai alasan tidak memberikan sembako dalam bentuk gula atau minyak goreng. Pemerintah menilai itu bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat melainkan hanya merupakan keinginan masyarakat, terlebih buah-buahan, sayuran, maupun bahan pangan protein nabati seperti kacang hijau sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, dengan diberikannya sembako kacang hijau, telur, beras, sayuran, dan buahan turut juga membantu mengembangkan usaha para petani lokal maupun pengusaha kecil di kota tersebut (dalam hal ini di kota Sibolga) sehingga uang dari pemerintah bisa diterima rakyat kecil yang berperan sebagai supplier atau pemasok sembako untuk meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pengembangan usaha.

c. Memastikan Kesesuaian Bahan Pangan

Pada praktiknya, saat penyaluran masih ada e-Warong yang menyediakan bahan pangan yang tidak sesuai dengan pedoman, misalnya susu, gula, dan minyak goreng. Keputusan e-Warong menjual bahan pangan yang tidak sesuai dikarenakan tuntutan KPM yang merasa komoditi tersebut lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan bantuan pangan masih memiliki dilema antara pemenuhan kebutuhan gizi dengan kebutuhan riil yang diinginkan KPM saat ini. Hal ini menjadi kendala Dinas Sosial yang bertugas untuk mengawasi kesesuain prinsip pelaksanaan Program Sembako dengan praktiknya di e-Warong Kota Sibolga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial semakin meningkatkan evalusi dan pemantauan dengan strategi yang tepat ke masing-masing e-Warong setiap pelaksanaan penyaluran sehingga bisa dilakukan upaya preventif terhadap potensi masalah yang ada.

SIMPULAN

Program Sembako merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi hak akses terhadap kebutuhan dasar dan memberikan gizi yang seimbang kepada masyarakat. Indeks bantuan pada Program Sembako sebesar Rp150.000/KPM/bulan dan kemudian pada Maret 2020 naik menjadi Rp200.000/KPM/bulan sebagai bentuk stimulus untuk mengurangi dampak Covid-19. Komoditas bahan pangan pada Program Sembako mensyaratkan beberapa jenis kandungan gizi yang harus dipenuhi mencakup sumber karbohidrat, sumber protein nabati, sumber protein hewani, dan sumber vitamin dan mineral. Pemberian bantuan Program Sembako dilakukan secara nontunai dengan cara menukarkan saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki oleh Keluarga penerima manfaat (KPM). Pembayaran bahan pangan dilakukan dengan mesin *electronic data capture* (EDC).

Pada tahun 2020 terdapat rata-rata 4.840 keluarga penerima bantuan Program Sembako dari 6.560 KK yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) Kota Sibolga. Sepanjang tahun 2020, penyaluran dilakukan sekali dalam sebulan. Alokasi KPM mengalami perubahan jumlah dari waktu ke waktu akibat perbaikan data yang senantiasa dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga. Jumlah bantuan yang tersalur jumlahnya lebih kecil dari alokasi KPM. Perbedaan jumlah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti KPM pindah, meninggal dunia, atau tidak ditemukan, termasuk jika KKS hilang atau rusak. KPM diberi kebebasan untuk berbelanja di e-Warong manapun yang telah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Sibolga dan Bank BRI KC Sibolga. Hal ini mendorong e-Warong untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam rangka penyediaan bahan pangan, e-Warong diberikan kebebasan untuk menentukan pasokan bahan pangan yang berkualitas termasuk dalam menentukan *supplier*-nya.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10159

Dalam menyalurkan bahan pangan Program Sembako, pemerintah yang bekerja sama dengan bank penyalur menunjuk beberapa e-Warong KUBE (elektronik warong gotong royong kelompok usaha bersama). Di Kota Sibolga terdapat lima e-Warong KUBE dari sembilan belas e-Warong yang ada. E-Warong KUBE dibentuk dengan memberdayakan masyarakat-masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program Sembako memberikan dampak pemberdayaan kepada e-Warong KUBE, antara lain.

1. Meningkatkan pendapatan e-Warong KUBE dengan bertambahanya kegiatan usaha dan pelanggan baik KPM maupun non-KPM.
2. E-Warong KUBE memiliki kepastian pendapatan dari hasil penyaluran bahan pangan tiap bulannya. Pendapatan ini menjadi penopang untuk pendapatan lainnya dari usaha reguler sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha e-Warong KUBE.
3. Pemanfaatan mesin EDC untuk tambahan kegiatan usaha seperti transfer, setor pasti, isi ulang pulsa, tarik tunai, setor tunai, bayar liistrik, bayar telepon, bayar cicilan, bayar tagihan telepon, bayar BPJS, dan pembayaran tiket.
4. Anggota-anggota e-Warong KUBE juga menerima bantuan pangan Program Sembako. Pemberian bantuan pangan akan membantu para anggota e-Warong KUBE memenuhi sebagian kebutuhan pangan, dan memperoleh gizi yang lebih seimbang. Selain itu, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
5. Dengan berperan sebagai penyalur bahan pangan, e-Warong KUBE juga terlatih untuk mengembangkan jiwa berwirausahanya. E-warong KUBE dalam menjalankan usahanya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada KPM, pelanggan, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan; menyediakan bahan pangan dengan kualitas yang baik dan lengkap. Selain itu, e-Warong KUBE juga akan memilih pemasok, menentukan harga, dan jumlah bahan pangan. Untuk mencapai tujuan dari upaya-upaya tersebut, diperlukan jiwa berwirausaha yang diwujudkan dalam tindakan pengembangan usaha dan kemampuan penanganan masalah, seperti kemampuan berkomunikasi dan keramah-tamahan kepada KPM, dan kemampuan mencari solusi dan mengambil tindakan jika terjadi permasalahan saat penyaluran.

Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Sembako di kota Sibolga yang dirasakan oleh e-Warong KUBE dan Dinas Sosial Kota Sibolga, antara lain:

1. Kendala bagi e-Warong KUBE
   a. Rendahnya partisipasi anggota-anggota KUBE mengakibatkan terjadinya penurunan efisiensi dan pemberian pelayanan kepada KPM sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan dan menghambat pengembangan usaha.
   b. Rendahnya kemampuan manajemen usaha yang ditunjukkan oleh beberapa hal, seperti belum berjalannya kepengurusan dan pembagian tugas anggota, pemahaman yang kurang komprehesif terhadap konsep Program Sembako, pemahaman proses bisnis dan *market analysis* yang masih belum komprehensif, *market share* yang masih terbatas di lingkungan KPM, dan rendahnya kemampuan pengambilan keputusan.
   c. Ketiadaan pelatihan dan bantuan manajerial menimbulkan beberapa permasalahan antara lain, minimnya kemampuan pengelola e-Warong dalam mengambil solusi saat terjadi, lambatnya pengembangan usaha, rendahnya inovasi, tingginya tingkat ketergantungan pada program pemerintah (seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan) dalam menjalankan usaha, dan rendahnya pemahaman terhadap SOP saat ada kendala mesin EDC.

d. Adanya persaingan antar e-Warong dalam hal kemampuan mengembangkan usaha, melayani KPM, dan manajerial usaha.
e. Mesin EDC yang terkadang mengalami kendala sinyal atau eror dan sering terjadi permasalahan saldo nol dan keterlambatan saldo pada KKS dapat memperlambat proses penyaluran dan risiko bahan pangan yang bisa membusuk.

2. Kendala bagi Dinas Sosial Kota Sibolga
   a. Kurangnya koordinasi dengan bank penyalur (Bank BRI Kantor Cabang Sibolga).
   b. Kesulitan dalam menghadapi keinginan KPM. Kebijakan bantuan pangan masih memiliki dilema antara pemenuhan kebutuhan gizi dengan kebutuhan riil yang diinginkan KPM saat ini
   c. Memastikan kesesuaian bahan pangan yang disediakan oleh e-Warong dengan aturan dan Pedoman Umum yang telah ditetapkan.

REFERENSI

Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut*, *5*(2), 53–63.

Akhmadi, M. H. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan*, *2*(1), 99–114.

Daniel A.R. (2012). Suatu Kajian Tentang Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalulintas. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *5*(5), 48–57.

Hilmi, M. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui e-Warong Turi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH (Program Keluarga Harapan) untuk Kemandirian Ekonomi Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan*.

Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(3), 86–103.

Kurniawan, F., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Negara*, *2*(2), 103–220.

Miar, M., & Yunani, A. (2020). The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *18*(1), 91–102.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Riyanta, A. B., Nurcahyo, H., & Santoso, J. (2020). Implementasi Paket Bantuan Sosial Sebagai Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *1*(2), 82–86. https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.2717

Sabarisman, M., & Suradi, S. (2020). Bantuan Pangan, Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial: Kasus Belitung Timur. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *9*(3), 285–294. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.2038

Setyawati, I. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perekonomian Nasional. *Majalah Ilmiah Widya*, *26*(288), 50–57. https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/7qkj6

Suharto, E. (2005). *Kebijakan Sosial Indonesia*. *1–18*. http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf

Taruno, H. T. (2019). Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia. *IJPD: The Indonesian Journal of Planning and Development*, *4*(2), 49–56.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.